

Position Paper Pembentukan NTB Center

NTB CENTER: PERAN UI DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN NTB

Oleh:

Arifuddin Hamid

Universitas Indonesia  
Depok, Jawa Barat  
2011

## Daftar Isi

Halaman cover.....	1
Daftar isi.....	2
Ringkasan konsep.....	3
I. Selayang Pandang.....	7
A. Potret NTB.....	7
B. Potret UI.....	9
II. Membangun Kemitraan.....	11
A. Landasan Filosofis.....	11
B. Motif Ekonomi.....	12
C. Motif Politik.....	12
D. Motif Sosial budaya.....	14
III. NTB Center.....	16
A. Format kelembagaan.....	16
B. Mekanisme organisasi.....	17
C. Program strategis.....	18
1. Riset kebijakan.....	18
2. Seminar dan publikasi kajian.....	19
3. Business meeting.....	20
4. NTB Expo.....	21
5. Pemberdayaan SDM.....	22
IV. Rekomendasi.....	22
A. Pertemuan NTB-UI.....	22
B. Nota Kesepahaman (MoU) .....	23
C. Formalisasi institut.....	23
D. Wujud afiliasi kampus.....	24
Daftar Bacaan.....	25

## Ringkasan Konsep

Tulisan ini lahir dari kegelisahan penulis selaku putra NTB yang sedang menempuh pendidikan di seberang pulau. Dalam berbagai forum dan interaksi keseharian, acapkali penulis jengah. Entah karena individu-individu di tempat penulis menempuh studi buruk dalam pelajaran geografi, atau justru NTB yang terasing dari arus-putar informasi, tidak jelas mana yang betul. Namun satu hal yang pasti, NTB bagai berada di negeri dongeng. Dimana itu NTB (baca: nama dan lokasi daerah), hampir semua orang yang ditemui penulis menggeleng kepala. Miris memang, tapi itulah kenyataannya. Untuk nama dan lokasi saja tidak dikenal, apalagi potensi alam, peluang investasi, dan potret infrastrukturnya?

### Motif Strategis

Bahwa sekarang dunia telah begitu *mobile*, nampak benar adanya. Informasi berseliweran kesana-kemari. Tanpa batas, orang dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Digitalisasi informasi telah mengkonstruksi peradaban baru, ruang maya menegasi disparitas geografis.

Thomas L. Friedman (2006) dalam bukunya “The World is Flat” dengan tegas sesumbar, bumi telah menjadi begitu datar, tak lagi dibatasi oleh sekat-sekat kaku geografis dan sistem lokal nasional. Walau dalam beberapa hal tepat, penulis melihat relatifitas tesis tersebut. Memang distorsif, kenyataannya NTB kurang mengamini ungkapan Friedman.

Sejatinya, mobilitas informasi mampu mencerahkan persepsi masyarakat ibukota. Apalagi NTB masih dalam satu wilayah nasional, dengan dukungan sistem administrasi yang jelas. Dibanding Bali, citra NTB di mata dunia *bak* bumi dan langit. Walau sekarang “*Visit Lombok dan Sumbawa*” gencar dikampanyekan, faktanya NTB tidak mampu menjadi *icon* baru pariwisata nasional.

Pembentukan NTB Center berangkat dari berbagai alasan logis-strategis. Tim NTB Center mengkonstruksinya ke dalam 4 (empat) aspek. *Pertama*, landasan filosofis. Dalam berbagai kajian dan riset mendalam, tim NTB center UI berkesimpulan, bahwa tantangan utama pembangunan NTB hari ini adalah keasingan NTB di tengah percaturan politik, ekonomi, dan sosial budaya, baik di tingkat global, maupun nasional Indonesia. Faktor keasingan menjadi masalah yang membelenggu NTB, sehingga potensi alam dan sekian keunggulan lainnya tidak tergarap dengan optimal. Keasingan atas NTB tentunya tidak berangkat dari ruang kosong, namun terjadi karena publikasi yang teramat kurang. Di kampus tempat tim NTB Center menempuh studi, keasingan tersebut terlihat demikian parah, baik di kalangan mahasiswa, pengajar, maupun pejabat administratif kampus pada umumnya. Di Jakarta, kesan serupa tidak jauh beda. Kalaupun sekarang NTB dikenal dengan keindahan pantai dan wisata bawah lautnya, itu karena pengaruh Bali sebagai tujuan wisata. Selebihnya, karena faktor alamiah.

*Kedua*, motif ekonomi. NTB adalah daerah yang memiliki potensi alam melimpah, mulai dari sektor pertambangan dan energi, sampai aspek perairan dan kelautan. Potret potensi tersebut menyisakan peluang ekonomi yang menggiurkan. Namun kendala pemasaran karena publikasi yang teramat kurang, dan investasi yang minim menjadi permasalahan utama yang menghambat

perkembangan ekonomi daerah. Permasalahan ini sebenarnya hal klasik yang sampai sekarang belum mampu dicarikan solusinya yang tepat. *Ketiga*, motif politik. Di era otonomi daerah, rencana pembangunan juga tidak berjalan optimal. Setelah 10 tahun reformasi, dengan desentralisasi kekuasaan yang menjadi corak pemerintahan, NTB tetap berada di urutan-urutan terakhir. Bahkan dalam konteks politik nasional, NTB bukanlah “kawasan elit” yang memiliki *rating* istimewa. Miris memang, namun begitulah kenyataannya. Bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, namun ini menjadi cambuk semangat untuk membangun NTB yang lebih baik lagi.

Dan *keempat*, motif sosial budaya. Secara praktis, kebudayaan akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah. Karena kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang dan sebagainya. Sehingga bagaimana mobilitas ekonomi penduduk adalah eksekusi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini NTB, adanya pandangan tertentu dalam masyarakat mengenai kebiasaan berusaha, akan berdampak terhadap daya saing ekonomi daerah. Jikalau secara nasional NTB masih berada di urutan bawah, bahkan tidak termasuk primadona ekonomi nasional, tidak terlepas dari kebudayaan ekonomi masyarakat. Kalau mencermati data BPS (2010), indikator sosial-ekonomi NTB tidaklah begitu menggembirakan.

Mengacu pada statistika dan fakta di atas, NTB Center merupakan ijtihad intelektual yang digagas perantau NTB di UI, guna akselerasi kualitas hidup masyarakat NTB. Dan perbaikan hidup tersebut berangkat dari transformasi pola pikir, pengembangan peradaban ilmu. Masyarakat NTB ke depan kita harap menjadi semakin sadar ilmiah, menjemput dinamika zaman, dan bergaul intim dengan wacana kemajuan. NTB Center adalah sebetuk oase, yang akan menjadi mata air pembangunan NTB, suatu langkah kecil yang akan berdampak besar.

## **Publisitas**

Mungkin pertanyaan menyeruak muncul, UI bisa apa? Penulis sadar, pesimisme wajar untuk diungkap. Selain karena UI begitu jauh letaknya, dipersepsikan kurang memahami realitas daerah, institusi riset sudah begitu banyak di NTB.

Namun demikian, UI tentu memiliki keistimewaannya sendiri. Selain dikenal sebagai basis intelektual, yang terpenting dan relevan adalah takdirnya sebagai katalisator wacana di tingkat nasional. Tidak mungkin dinafikan, bahwa UI menjadi begitu penting dalam upaya marketing gagasan, pengembangan jaringan, maupun massifikasi informasi. Kalau ditarik, peran UI dalam mendukung pembangunan di NTB adalah sebagai publikator potensi, selain fungsi riset-akademiknya.

Dalam melaksanakan fungsi publikasi tersebut, tentunya perlu kerjasama terarah diantara para pihak. UI sebagai wahana publisitas, pemerintah daerah sebagai *supplier* informasi, dan mahasiswa sebagai eksekutor publikasi. Dengan pola seperti ini, diharapkan akselerasi pembangunan di NTB bukan lagi sekadar impian.

Jikalau Richard Posner, pakar hukum ekonomi Chicago University sempat mengungkap adanya “asymmetric information”, ketimpangan informasi riskan terjadi, kemitraan strategis ini menjadi solusi. Terutama dalam pengenalan produk dan potensi daerah, optimalisasi dapat dilaksanakan sesingkat-singkatnya. Pada akhirnya, NTB dengan cepat menjadi primadona baru.

## **NTB Center**

Lantas, institusi macam apa yang mampu melakoni peran demikian? Dalam pandangan penulis, format kelembagaannya harus profesional, independen namun berbasis, dengan network nasional maupun internasional. Berafiliasi intim dengan pihak kampus dan berwibawa di mata kepala daerah.

Bahwa yang menjadi dalang adalah mahasiswa NTB, tidak berarti cirinya seperti paguyuban. Logika profesional niscaya menjadi lebih utama dibanding pertautan emosional. Dengan demikian, kerja keseharian institusi ini adalah pengenalan sumber daya, penguatan jaringan, dan pemberdayaan riset. Dengan independensinya, institusi tersebut mampu menjalankan perannya secara optimal, tanpa perlu takut adanya intervensi. Layaknya masyarakat kampus, kemerdekaan berwacana tentu sudah *given*. Sebab demikian, independen berbasis dapat dimaknai dengan adanya komunikasi intim antara mahasiswa, UI, dan pemerintah daerah. Perkawinan antara kata “independen” dan “berbasis” adalah manifestasi dua peran, bahwa institusi ini juga berlakon sebagai medium strategis penyusunan kebijakan pemerintahan. Dalam mendukung (khususnya) fungsi publikasi tersebut, harus ada kesepakatan legal, hitam di atas putih antara Pemerintah NTB dengan pihak UI. Hal ini penting (malah niscaya) sebagai legitimasi peran.

Agar tidak terjebak dalam normatifitas wacana, praksisme perlu dirajut. Oleh karenanya, kristalisasi dalam bentuk kegiatan taktis wajib adanya. Penulis mengkonstruksinya dalam lima program unggulan. *Pertama*, riset kebijakan, yakni berupa analisis dan rekomendasi kebijakan. Riset kebijakan dalam pengertian analisis kebijakan berarti aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan yang dianalisis oleh NTB Center akan dijadikan sebagai bahan mentah bagi rekomendasi seperti apa yang akan disampaikan terkait masalah yang bersangkutan. Artinya, rekomendasi kebijakan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan-kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi, atau aktivitas politik. *Kedua*, seminar dan publikasi kajian. Dalam seminar dan publikasi kajian ini, masyarakat akademik, baik dari kalangan UI sendiri, maupun dari pihak luar dapat bersama bertukar pikir, guna pencarian solusi efektif atas permasalahan kedaerahan. Sasarannya, terbentuk opini bersama, bahwa NTB menyimpan sekian keunikan yang dapat diteliti lebih lanjut.

*Ketiga, business meeting.* kegiatan ini berwujud dialog strategis antara pemerintah NTB dengan organisasi kepengusahaan dan yang berkaitan dengan industri. Dalam hal ini terutama dengan kadin dan apindo, dan asosiasi buruh perlu adanya kesinambungan pemahaman. Aktor-aktor terkait dalam bidang usaha dan investasi dipertemukan dalam satu ruangan, saling berbagi informasi, dan mengkonstruksi dialog bisnis strategis. *Keempat*, NTB expo. Kegiatan akan menjadi ajang pertukaran informasi berskala nasional, dan bahkan global. Apa-apa yang selama ini publik tidak ketahui tentang NTB, dapat dipamerkan disini. Baik informasi mengenai potensi

alam, produk kerajinan lokal, sampai keunikan budaya akan disajikan dalam pameran ini. Sebagai wujud praktisnya, dalam acara tersebut akan dijelaskan secara mendalam mengenai NTB sebagai suatu wilayah, potensi alam, sumber daya yang dapat digarap, termasuk peluang investasinya. Dan yang menjadi target utama NTB Expo adalah para pengusaha, baik lokal maupun asing.

Selanjutnya yang *kelima*, pemberdayaan SDM. NTB Center diharapkan mampu menjadi advokator elit strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah NTB dan UI. Harapannya, terdapat prioritas bagi para calon mahasiswa asal NTB, sehingga dengan mudah dapat menempuh studi di universitas terbaik negeri ini. Pemberdayaan SDM ini adalah sebetuk investasi untuk menyokong pembangunan masa depan, bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat kembali mengabdikan untuk daerah, membangun NTB dengan basis pengetahuannya selama menempuh studi di UI.

Demikian urgensi pembentukan NTB Center di UI. Bahwa potret buram NTB hari ini nyata adanya, tidak berarti harus berapologia. Kiranya kemitraan strategis ini diwujudkan, Pemerintah Provinsi NTB niscaya menjadi pionir.\*\*\*

## I. Selayang Pandang

### A. Potret NTB

NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT<sup>1</sup>. Ditilik dari sejarah terbentuknya, jelas bahwa NTB sudah sejak lama menemukan administrasinya. Artinya, manajemen kekuasaan berkerangka konstitusi telah berjalan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sehingga tidak salah, ketika berbicara sejarah NTB, tidak mungkin dinegasikan terbentuknya daerah di sekitarnya. Salah satunya Bali, yang sekarang sebagai *icon* pariwisata nasional, menjadi bahan komparasi yang niscaya untuk dilakukan.

Pada tahun 2010, jumlah penduduk NTB mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, penduduk NTB berjumlah 4.503,2 ribu jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 228 km<sup>2</sup>, dan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bekerja sejumlah 2.003.781 jiwa<sup>2</sup>.

Mengacu data statistika, baik hasil riset institusi resmi pemerintahan (BPS dan BPSD) maupun lembaga kajian partikelir (NGO/ LSM), NTB memiliki sekian banyak kekayaan alam dan sumber daya potensial yang dapat digarap. Dari berbagai potensi alam dan sumber daya strategis NTB, kontribusi terbesar produk nasional domestik bruto (PDRB) disumbang oleh sektor pertambangan yaitu sebesar 26,15%, sektor pertanian 25,57%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,16% dan sektor jasa sebesar 10%<sup>3</sup>.

NTB memiliki karakteristik potensi, mulai kehutanan, mineral dan pertambangan, perairan dan kelautan, perkebunan dan pertanian, industri dan kerajinan tangan, serta pariwisata. Potensi alam tersebut tersebar di berbagai daerah di NTB. Dan pemanfaatannya bersifat difusif, serta memiliki saham yang besarnya berbeda dalam mendukung APBD NTB.

Penggunaan lahan di NTB pada umumnya terbagi atas kawasan lindung, kawasan budidaya kehutanan, dan budidaya non kehutanan (pertanian dan non-pertanian). Luas kawasan lindung dan kawasan budidaya kehutanan seluas 1.069.998 ha (53% dari total daratan Provinsi NTB). NTB memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan potensi kayu hutan yang cukup berlimpah seperti kayu bulat, kayu rimba, kayu kebun, kau jati dan gaharu. Disamping itu, hutan NTB juga menghasilkan rotan, kemiri, bambu, air madu dan asam. Produksi hasil hutan terkonsentrasi di Kab. Sumbawa dan Dompu<sup>4</sup>. Tetapi Kawasan

---

<sup>1</sup> [http://Www.Ntbprov.Go.Id/Tentang\\_Sejarah.Php](http://Www.Ntbprov.Go.Id/Tentang_Sejarah.Php), "Sejarah Singkat Provinsi Nusa Tenggara Barat", diunduh tanggal 6 Januari 2011.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2010*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hal. 12,13,22

<sup>3</sup> Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen kehutanan, *Potensi Sumber Daya Hutan Produksi Nusa tenggara Barat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen kehutanan, 2009), hal. 2.

<sup>4</sup> *Economic Review Journal*, No. 199, Maret 2005, hal. 11

Budidaya Kehutanan ini belum dikembangkan secara optimal dibandingkan dengan sektor lainnya (pertanian khususnya tanaman pangan dan perkebunan)<sup>5</sup>.

NTB juga memiliki potensi endapan bahan galian mineral industri seperti batu apung, batu gamping, marmer, lempung, andesit, kaolin, toseki, kalsit, dsb. NTB diperkirakan mengandung sumberdaya minyak dan gas bumi yang keberadaannya diperkirakan di lepas pantai utara Pulau Lombok. Sumberdaya mineral golongan B (Vital) yang telah ditemukan adalah logam mulia (emas dan perak), logam dasar (timbal dan tembaga), logam besi serta mineral industri (belerang). Emas, perak dan tembaga diperkirakan terdapat di hampir seluruh kabupaten provinsi NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Eksploitasi tembaga dan emas dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Potensi tembaga NTB yang telah diketahui sebesar 930 juta ton bijih yang setara dengan 5 juta ton tembaga. Disamping itu, terdapat pula potensi sumberdaya oksida 56 juta ton dengan kadar 0,37% Cu dan 0,12g/t emas<sup>6</sup>.

Wilayah perairan laut NTB seluas 29,16 ribu km<sup>2</sup> dengan potensi lestari perikanan tangkap 98,45 ribu ton per tahun. NTB juga berpotensi untuk budidaya rumput laut, mutiara dan kerapu. Potensi areal kerapu mencapai 1.445 ha yakni di Pulau Lombok 130 ha dan Pulau Sumbawa 1.315 ha. Sementara itu, potensi lahan budidaya rumput laut diperkirakan mencapai 21.100 ha, namun baru sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan<sup>7</sup>.

Potensi areal perkebunan NTB mencapai 665.314 ha. Dari luas tersebut yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 28%. Pemanfaatannya meliputi untuk tanaman keras 150,15 ribu ha dan tanaman semusim 34,14 ha. Sebagian besar usaha perkebunan atau 97,5% merupakan perkebunan rakyat dan 2,47% perkebunan besar. Terdapat 16 jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan yang terdiri dari 10 jenis tanaman keras dan 6 jenis tanaman semusim. Areal perkebunan terluas adalah kelapa (66,17 ribu ha), jambu mete (53,31 ribu ha), dan Kopi (10,33 ribu ha). Sejak beberapa tahun terakhir, NTB juga telah berkembang menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia yang memasok kebutuhan tembakau beberapa pabrik rokok. Komoditi perkebunan lainnya adalah kapuk, kakao, asam, kemiri, cengkeh, pinang, vanili dan jarak<sup>8</sup>.

NTB memiliki potensi industri dan kerajinan tangan rumah tangga yang cukup besar. Potensi ini dalam bentuk keterampilan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat NTB dalam bidang pemintalan, pandai besi, anyam-anyaman, kerajinan dari tanah liat, pahatan dan proses produk agro industri. Namun pengrajin dihadapi kendala terbatasnya modal dan tidak tersedianya fasilitas pelabuhan peti kemas untuk ekspor-impor sehingga sebagian besar ekspor dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Denpasar. Akibatnya banyak hasil kerajinan NTB yang diberi label "Made in Bali" sebelum diekspor<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen kehutanan, *op.cit.*,

<sup>6</sup> *Economic Review Journal*, *op. cit.* hal. 12

<sup>7</sup> *Economic Review Journal*, *op. cit.* hal. 14

<sup>8</sup> *Economic Review Journal*, *op. cit.* hal. 15

<sup>9</sup> *Economic Review Journal*, *op. cit.* hal. 16,17

Terdapat 15 kawasan potensial sebagai pusat wisata di NTB yang terdiri dari 9 kawasan di Lombok dan 6 kawasan di Sumbawa (wisata alam, bahari dan budaya). Kawasan pengembangan wisata di Lombok terdiri dari kawasan Senggigi, Gili Gede, Suranadi, Pantai Kuta, Silong Belanak, Sade, Gili Indah, Gunung Rinjani dan Gili Sulat. Sedangkan kawasan wisata di Sumbawa terdiri dari Pulau Moyo, Pantai Maluk, Pantai Hu'u, Tambora, Teluk Bima dan Sape<sup>10</sup>.

## B. Potret UI

UI berdiri pada tahun 1849 dan merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia<sup>11</sup>. Bermula dari sekolah Dokter Jawa yang berdiri tahun 1849, perjuangan intelektual UI sebangun dan senafas dengan perjuangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi bangsa ini. Di dalam universitas Indonesia tertanam tradisi pengabdian terhadap bangsa dan negara, yang menjadikan UI terus berkarya bagi nama besar bangsa ini<sup>12</sup>.

Secara geografis, posisi kampus UI berada di dua area berjauhan, kampus Salemba dan kampus Depok. Mayoritas fakultas berada di Depok dengan luas lahan mencapai 320 hektar dengan atmosfer *green campus* karena hanya 25% lahan digunakan sebagai sarana akademik, riset dan kemahasiswaan. 75% wilayah UI bisa dikatakan adalah area hijau berwujud hutan kota dimana di dalamnya terdapat 8 danau alam. Sebuah area yang menjanjikan nuansa akademik bertradisi yang tenang dan asri<sup>13</sup>. Dengan letak yang strategis namun tetap menjaga keheningan intelektual, UI diharapkan mampu menjadi wahana akademik yang nyaman. Sehingga proses tukar ilmu dapat berjalan optimal.

Sebagai suatu institusi akademik, universitas dapat dikatakan sebagai tulang punggung peradaban sebuah bangsa. Mutu universitas menentukan secara fundamental posisi ekonomi, politik, sosial, budaya bangsa di tengah peradaban dunia. Sebab itu, tidak bisa tidak universitas-universitas di Indonesia sebisa mungkin harus masuk ke dalam jajaran elit perguruan tinggi di dunia. Empat indikator utama yang dipakai untuk mengukur "kelas dunia" sebuah universitas yakni<sup>14</sup> pertama, *teaching performance* yang diukur berdasarkan rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa. Indikator kedua adalah *graduate employability* yang diukur berdasarkan waktu tunggu lulusan sebelum bekerja dan survei kepuasan pengguna kepada berbagai perusahaan di dunia. Indikator ketiga adalah internasionalisasi yang diukur berdasarkan jumlah mahasiswa, peneliti, dosen asing, publikasi internasional sfaf pengajar, dan survei terhadap lebih dari 5000 akademisi di seluruh dunia mengenai universitas bersangkutan Indikator keempat adalah riset dan publikasi yang diukur berdasarkan jumlah publikasi ilmiah dan angka rata-rata *citation index* staf akademik universitas.

---

<sup>10</sup> *Economic Review Journal*, op. cit. hal. 18.

<sup>11</sup> <http://www.ui.ac.id/id/profile/page/pengantar>, "Tentang UI: Pengantar", diunduh 10 Januari 2011.

<sup>12</sup> "Sambutan Rektor UI: Perjuangan untuk Bangsa", dalam UI Untuk Bangsa: Rumusan Pemikiran untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Adil, BEM UI 2009 dan ILUNI UI, 2009.

<sup>13</sup> <http://www.ui.ac.id/id/profile/page/pengantar>, "Tentang UI: Pengantar", diunduh 10 Januari 2011.

<sup>14</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Membangun Pendidikan Nasional untuk Peradaban yang Berkelanjutan", dalam UI Untuk Bangsa: Rumusan Pemikiran untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Adil, BEM UI 2009 dan ILUNI UI, 2009,

Untuk menjadikan Universitas Indonesia sebagai institusi akademik berkelas dunia, terus dilakukan kerja konkret dalam mewujudkan tiga visi utama Universitas Indonesia<sup>15</sup>. *Pertama*, Universitas Indonesia sebagai parameter dan tolok ukur bagi komunitas nasional, regional, dan internasional. Universitas Indonesia, misalnya, harus menjadi tolak ukur nasional dalam pengembangan kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi yang akan menunjukkan tingkat pendidikan suatu bangsa. Sementara dalam tingkat regional dan internasional, Universitas Indonesia harus menjadi tolak ukur dalam studi mengenai Indonesia, kearifan lokal, dan terorisme.

*Kedua*, Universitas Indonesia harus menjadi yang pertama dalam pengembangan keilmuan melalui riset-riset terobosan yang berkualitas. Komitmen UI sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset berkelas dunia senantiasa berjalan dengan tidak hanya membentuk generasi muda yang cerdas tetapi juga memiliki kreativitas tinggi dan semangat inovasi. Dan *ketiga*, Universitas Indonesia sebagai energizer, baik dalam maupun keluar. Universitas Indonesia harus mampu memberdayakan unit-unit kerja seperti departemen, program studi, dan lembaga kajian untuk mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas di dalam pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Sementara pemberdayaan keluar bisa dicapai melalui pembentukan UI *think-tank group* yang bertugas memikirkan pelbagai skenario pemecahan masalah bagi beragam persoalan yang dihadapi bangsa.

Sebagai sebuah kampus yang memiliki sejarah panjang, bahkan lebih panjang dari usia republik, UI tentunya telah menghasilkan sekian banyak alumni. Hingga sekarang, UI telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni<sup>16</sup>, yang tersebar di berbagai pelosok dan pojok strategis kekuasaan negeri ini. Baik di pemerintahan pusat, daerah, lembaga keuangan, korporasi, maupun LSM/ NGO. Dan dengan predikatnya sebagai kampus terbaik negeri ini, UI secara aktif mengembangkan kerja sama global dengan banyak perguruan tinggi ternama dunia, juga memperkuat kerjasamanya dengan beberapa asosiasi pendidikan dan riset bertaraf global<sup>17</sup>.

Dalam konteks membangun hubungan kerjasama, UI selalu terbuka dan malah apresiatif dengan gagasan semacam itu. Sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat, UI memiliki direktorat khusus, yakni direktorat riset dan pengabdian masyarakat. Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan UI dalam membangun peradaban intelektual dan Indonesia yang lebih baik. Direktorat riset dan pengembangan masyarakat (DRPM) sendiri mempunyai salah satu tujuan yakni membangun kemitraan antara universitas, pemerintah, dan pelaku bisnis dalam hal pelaksanaan pengabdian masyarakat<sup>18</sup>. Dengan adanya pola kemitraan seperti ini, NTB Center memiliki legitimasi untuk menjadi pusat studi regional, yang fokus pada pengembangan investasi dan potensi daerah lainnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> <http://www.ui.ac.id/id/profile/page/pengantar>, "Tentang UI: Pengantar", diunduh 10 Januari 2011.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> [http://www.research.ui.ac.id/v1/index.php?option=com\\_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=116](http://www.research.ui.ac.id/v1/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=116),

"Kegiatan Pengabdian Masyarakat DRPM UI", diunduh 10 Januari 2011.

## II. Membangun Kemitraan

Gagasan untuk mewujudkan kemitraan strategis antara NTB dengan UI tentunya berangkat dari pijakan empirik. Artinya, terdapat alasan-alasan logis dibalik gagasan yang diusung. Sehingga NTB Center merupakan suatu keharusan sejarah yang tidak mungkin ditolak.

Untuk memperkuat argumentasi tersebut, tentunya harus ada penjelasan yang terang mengenai apa yang menjadi landasan dan motif pembentukan institusi. Menjadi penting, karena selain akan menegaskan wacana, juga menjadi sandaran operasional bagi pengembangan kinerja institusi ke depan. Dalam konteks tersebut, penulis merangkumnya dalam empat alasan strategis, berupa landasan filosofis, motif ekonomi, motif politik, dan motif sosial budaya.

### A. Landasan Filosofis

Dalam berbagai kajian dan riset mendalam, tim NTB center UI berkesimpulan, bahwa tantangan utama pembangunan NTB hari ini adalah keasingan NTB di tengah percaturan politik, ekonomi, dan sosial budaya, baik di tingkat global, maupun nasional Indonesia. Faktor keasingan menjadi masalah yang membelenggu NTB, sehingga potensi alam dan sekian keunggulan lainnya tidak tergarap dengan optimal. Keasingan atas NTB tentunya tidak berangkat dari ruang kosong, namun terjadi karena publikasi yang teramat kurang. Di kampus tempat tim NTB Center menempuh studi, keasingan tersebut terlihat demikian parah, baik di kalangan mahasiswa, pengajar, maupun pejabat administratif kampus pada umumnya. Di Jakarta, kesan serupa tidak jauh beda. Kalaupun sekarang NTB dikenal dengan keindahan pantai dan wisata bawah lautnya, itu karena pengaruh Bali sebagai tujuan wisata. Selebihnya, karena faktor alamiah.

Berangkat dari fakta tersebut, mahasiswa NTB di UI, baik yang S1 maupun pasca sarjana mengkonstruksi suatu wacana, membentuk institusi yang diarahkan sebagai katalisator pembangunan citra dan pengenalan potensi NTB. Dalam mempraksiskan wacana tersebut, perlu adanya kemitraan terarah antara Pemerintah NTB dengan Universitas Indonesia. Dengan kemitraan tersebut, NTB Center dapat dijadikan pusat studi resmi yang bermitra dengan Pemerintah NTB dan UI sekaligus.

Sebagai pusat studi, NTB Center akan dapat melakukan berbagai kegiatan konstruktif, dan menyusun konsep praksis dalam mewujudkan NTB yang lebih baik. NTB yang hari ini menjadi salah satu provinsi terbelakang, baik dalam dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB) maupun potret sumber daya manusia (IPM), dapat diakselerasi peringkatnya melalui kerja nyata yang sejalan dengan agenda ideal dalam kertas kerja pemerintahan. NTB Center, dengan dukungan SDM, lingkungan, dan jaringan ibukotanya, diharapkan mampu menyokong kinerja pemerintahan yang terkadang terkendala cacat bawaan berupa inefisiensi, misinformasi, dan kelambanan kinerja.

## B. Motif Ekonomi

Bahwa sekarang kita hidup di zaman globalisasi. Sebuah era dimana manusia, informasi, perdagangan, investasi, demokrasi, dan ekonomi pasar cenderung semakin melampaui batas-batas nasional. Internasionalisasi semakin membebaskan kita dari batas-batas ciptaan pembuat peta<sup>19</sup>. Dalam ungkapan Friedman (2006)<sup>20</sup> dalam bukunya “The World is Flat”, bumi telah menjadi begitu datar, tak lagi dibatasi oleh sekat-sekat kaku geografis dan sistem lokal nasional. Walau dalam beberapa hal tepat, penulis melihat relatifitas tesis tersebut. Memang distorsif, kenyataannya NTB kurang mengamini ungkapan Friedmann.

Sejatinya, mobilitas informasi mampu mencerahkan persepsi masyarakat ibukota. Apalagi NTB masih dalam satu wilayah nasional, dengan dukungan sistem administrasi yang jelas. Dibanding Bali, citra NTB di mata dunia *bak* bumi dan langit. Walau sekarang “*Visit Lombok dan Sumbawa*” gencar dikampanyekan, faktanya NTB tidak mampu menjadi *icon* baru pariwisata nasional.

NTB adalah daerah yang memiliki potensi alam melimpah, mulai dari sektor pertambangan dan energi, sampai aspek perairan dan kelautan. Potret potensi tersebut menyisakan peluang ekonomi yang menggiurkan. Jikalau mampu dimanfaatkan dengan baik, bukan tidak mungkin NTB akan masuk ke dalam jajaran provinsi dengan PDRB terbesar nasional. Pada akhirnya, NTB akan dipandang sebagai salah satu lumbung pendapatan nasional.

Apabila dicermati kritis potensi alam NTB (lihat poin A. Potret NTB), kendala pemasaran hasil alam adalah akibat dari publikasi yang kurang, sehingga produk-produk dari NTB kalah saing dibanding daerah lain. Padahal kualitas tidaklah lebih buruk, bahkan beberapa produk jauh mengungguli daerah-daerah lain. Permasalahan ini sebenarnya hal klasik yang sampai sekarang belum mampu dicarikan solusinya yang tepat. Investasi yang minim juga merupakan salah satu kendala utama, di samping publikasi potensi yang teramat kurang.

Dalam kondisi seperti inilah gagasan pembentukan NTB Center mendapatkan logikanya. Dengan daya dukung UI sebagai episentrum intelektual yang berbasis di ibukota, diharapkan NTB dapat terorbit dalam persaingan nasional dan global. Potensi alam dapat diperkenalkan kepada publik, persuasi massif dapat dilakukan secara apik, sehingga investasi menjadi implikasi logisnya.

## C. Motif Politik

Sebagai sebuah daerah dalam yurisdiksi nasional NKRI, berbicara pembangunan di NTB tentu tidak terlepas dari lakon pembangunan nasional. Apa yang merupakan narasi kebijakan nasional, juga akan menjadi demikian bagi NTB. Karena Indonesia adalah negara kesatuan, kebijakan pembangunan tentu tidak berbeda jauh antar daerah. Namun demikian, walau etik

---

<sup>19</sup>Johan Norberg, *Membela Kapitalisme Global [In Defense of Global Capitalism]*, diterjemahkan oleh Arpani dan Sukasah Syahdan, (Jakarta: Freedom Institute dan FNS, 2001), hal xix

<sup>20</sup>Thomas L. Friedman, *The World is Flat: A Brief History of The Twenty-First Century*, (New York, Picador/Farrar, Strauss and Girroux), 2007.

dalam konsep, ketimpangan terjadi begitu nyata. Sentralisasi pembangunan menjadi corak, kawasan tertentu di Indonesia terabaikan, salah satunya NTB.

Di era otonomi daerah, rencana pembangunan juga tidak berjalan optimal. Setelah 10 tahun reformasi, dengan desentralisasi kekuasaan yang menjadi corak pemerintahan, NTB tetap berada di urutan-urutan terakhir. Bahkan dalam konteks politik nasional, NTB bukanlah “kawasan elit” yang memiliki *rating* istimewa. Miris memang, namun begitulah kenyataannya. Bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, namun ini menjadi cambuk semangat untuk membangun NTB yang lebih baik lagi.

Terlebih dengan adanya ketidaksepakatan teoritik, orientasi pembangunan mana yang diambil belum sepenuhnya tertuntaskan wacananya. Bahwa pada zaman Orde Baru pertumbuhan ekonomi lebih dikedepankan, kesenjangan antar daerah menganga lebar. Dan di era reformasi ini, pengistimewaan kultural<sup>21</sup> menjadi tantangan pembangunan NTB ke depan. Di tengah ancaman globalisasi yang berpotensi menghempas, kreasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Oleh karenanya, pilihan akan orientasi pembangunan harus dimaknai dengan cermat.

Dikotomi orientasi pembangunan antara pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana diketahui, sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa pembangunan yang menekankan pada pemerataan lebih berdampak positif. Nilai positif ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yaitu: *Pertama*, bahwa orientasi pembangunan yang menekankan pada pemerataan akan mengangkat kesejahteraan penduduk secara lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan. *Kedua*, secara timbal balik, karena semakin banyaknya penduduk yang kesejahteraannya meningkat, pada gilirannya akan lebih banyak lagi sumberdaya manusia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian keberlanjutan pembangunan menjadi lebih pasti. Sebaliknya orientasi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan akan lebih menghasilkan kesenjangan dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Dalam literatur konvensional tentang kemiskinan, berbagai faktor ditengarai bertanggung jawab sebagai penyebab kemiskinan. Tingginya pertumbuhan penduduk, kesalahan atau lemahnya ketahanan pangan dan pelayanan kebutuhan dasar, kelangkaan lapangan kerja, dan kondisi iklim yang tidak mendukung adalah beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Akumulasi dari berbagai masalah tadi menyebabkan kemiskinan struktural dan konjungtural yang massal<sup>23</sup>. Sementara dalam literatur pembangunan, fenomena kemiskinan dikaitkan dalam kerangka transisi dari masyarakat pertanian menuju

---

<sup>21</sup>Pengistimewaan kultural dapat diartikan sebagai adanya ketimpangan akses pembangunan yang diakibatkan oleh perbedaan spirit kerja dan daya saing manusia.

<sup>22</sup>Tim Penyusunan Laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia Tahun 2007, *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007), hal. 3

<sup>23</sup>Lal. D, *Poverty and Development*, In: Siebert, Horst (Ed.): *The Ethical Foundations of the Market Economy*, (Tuebingen, 1994), hal. 148.

industri. Dengan demikian, kemiskinan direduksi pada kesenjangan penghasilan dalam fase-fase proses transisi<sup>24</sup>.

Bahkan dalam acara AMM Retreat (2011), Gubernur NTB ‘curhat’, bahwa Pemerintah dalam pengembangan wilayah Timur di Indonesia terkadang melupakan NTB karena kondisi geografisnya. Masih ada NTB di bagian timur Indonesia itu. Padahal NTB ini memiliki 280 pulau, dan 2 di antara pulau besar seperti Lombok dan Sumbawa<sup>25</sup>. Menjadi pantas untuk menyambut positif penunjukkan NTB sebagai lokasi penyelenggaraan. Namun demikian, event serupa teramat jarang. Persis disinilah, NTB Center menemukan legitimasinya untuk dibentuk. Sebagai publikator citra dan potensi NTB, diharapkan mampu menyumbang ketertarikan berusaha, demi pembangunan NTB yang lebih baik.

#### D. Motif Sosial Budaya

Koentjaraningrat (2002) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar<sup>26</sup>. Selanjutnya dibedakan antara wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian dan tindakan aktivitas manusia yang berpola. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu *ideas, activities, dan artifacts*. Gejala yang pertama mewujud dalam suatu sistem, yang kemudian dikenal dengan sistem budaya (*cultural system*), kemudian yang kedua disebut sistem sosial (*social system*), dan yang ketiga berupa perwujudan fisik<sup>27</sup>.

Berangkat dari konsepsi mendasar mengenai kebudayaan tersebut, NTB Center mencari legitimasi pembentukannya. Agar nantinya tidak sekadar menjadi institusi formil minus aktivitas, NTB Center haruslah bertolak dari permasalahan riil yang terjadi di NTB. Bahwa institusi ini memiliki tugas sejarah untuk mengkonstruksi pola pikir yang dinamis, bervisi progressif, namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Artinya, adanya transformasi adalah keniscayaan, tetapi unsur-unsur positif yang melekat dalam masyarakat NTB harus tetap dipertahankan.

Dalam konteks sosial budaya, NTB Center berperan sebagai agen modernisasi, yakni suatu kondisi dimana terjadi pemenuhan hakikat kemanusiaan, yang terlihat dalam dua indikator, materiil dan nonmateriil<sup>28</sup>. Untuk indikator nonmateriil, NTB masih mempunyai pekerjaan

---

<sup>24</sup>Muenkner. H, *Basic Cooperative Values to Fill a Conceptual Vacuum with Special Reference to Africa*, (Marburg, 1995), hal. 4.

<sup>25</sup><http://www.detiknews.com/read/2011/01/15/135923/1547123/10/jadi-tuan-rumah-amm-retreat-gubernur-curhat-kemajuan-lombok?n991103605>, “Jadi Tuan Rumah AMM Retreat, Gubernur Curhat Kemajuan Lombok”, diunduh 15 Januari 2011.

<sup>26</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 180

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 186, 187, 188

<sup>28</sup>Indikator materiil, misalnya tingkat konsumsi energi, kepemilikan radio atau TV, hingga jumlah pemakaian telepon. Sementara indikator nonmateriil seperti standar kesehatan penduduk (terdiri dari tingkat kematian bayi, tingkat harapan hidup, proporsi dokter terhadap jumlah penduduk, dan sebagainya). Perubahan demografi secara luas dapat digambarkan sebagai indikator kepadatan penduduk, atau proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap total penduduk.

rumah yang banyak. Potret suprastruktur yang tidak berjalan diametral, bahkan menghambat kemajuan harus dicarikan solusi yang elegan. Bagaimana masyarakat memandang hidup dan kehidupan di tengah globalisasi yang menjadi *trend*, haruslah dicermati secara bijak. Dalam konteks inilah NTB Center berperan. Dengan kemajuan dan keselarasan kultural yang menjadi visi, NTB akan berkembang mejnadi daerah yang maju, berdaya saing, serta ramah terhadap kearifan lokal.

Secara praktis, kebudayaan akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah. Karena kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang dan sebagainya<sup>29</sup>. Sehingga bagaimana mobilitas ekonomi penduduk adalah ekkses dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini NTB, adanya pandangan tertentu dalam masyarakat mengenai kebiasaan berusaha, akan berdampak terhadap daya saing ekonomi daerah. Jikalau secara nasional NTB masih berada di urutan bawah, bahkan tidak termasuk primadona ekonomi nasional<sup>30</sup>, tidak terlepas dari kebudayaan ekonomi masyarakat. Kalau mencermati data BPS (2010)<sup>31</sup>, indikator sosial-ekonomi NTB tidaklah begitu menggembirakan.

Macetnya pembangunan ekonomi tentu akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagaimana realitas sosial budaya NTB adalah yang menjadi instrumen baik tidaknya, atau layak tidaknya masyarakat hidup. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan indeks kualitas hidup. Indeks harapan hidup ini merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf. Indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat, tingkat pendapatan riil perkapita<sup>32</sup>. Kerangka teoritik tersebut berbasis pada kenyataan empirik NTB hari ini. Indeks pembangunan manusia (IPM) menempati urutan kedua dari bawah<sup>33</sup>, padahal IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita<sup>34</sup>.

---

Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif [Comparative Political Economy]*, diterjemahkan dari buku aslinya oleh Haris Munandar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 236

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1982), hal. 181.

<sup>30</sup>Lihat Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, *Ibid.*, hal. 62.

Pembangunan ekonomi merupakan kunci kemajuan manusia, yang dibedakan menjadi: a) tingkat pertumbuhan total GDP atau GDP per kapita; b) tingkat perubahan serangkaian indikator sosial yang mengukur kesejahteraan rata-rata individu; dan sebagai c) distribusi pendapatan atau kekayaan, serta keterkaitan antara satu makna dengan makna lainnya.

<sup>31</sup>Badan pusat Statistik membagi indikator utama sosial-ekonomi Indonesia ke dalam 10 topik, yakni geografi, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pengeluaran rumah tangga, pertanian, industri pengolahan dan konstruksi, perdagangan luar negeri, pariwisata dan transportasi, keuangan dan harga, serta pendapatan nasional dan regional.

Lihat Booklet Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2010*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010).

<sup>32</sup>Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999).

<sup>33</sup>Lihat [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=26&notab=2](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=26&notab=2), "Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 1996 – 2009", diunduh 11 Januari 2011.

<sup>34</sup>Lihat Booklet Badan Pusat Statistik, *op.cit*, hal. xvi

Mengacu pada statistika dan fakta di atas, NTB Center merupakan ijtihad intelektual yang digagas perantau NTB di UI, guna akselerasi kualitas hidup masyarakat NTB. Dan perbaikan hidup tersebut berangkat dari transformasi pola pikir, pengembangan peradaban ilmu. Masyarakat NTB ke depan kita harap menjadi semakin sadar ilmiah, menjemput dinamika zaman, dan bergaul intim dengan wacana kemajuan. NTB Center adalah sebetuk oase, yang akan menjadi mata air pembangunan NTB, suatu langkah kecil yang akan berdampak besar.

### III. NTB Center

#### A. Format Kelembagaan

Bahwa organisasi yang berbau primordial menjadi gejala umum di universitas, NTB Center tidak sepenuhnya diarahkan kesitu. Walau yang menjadi penggagas dan pelaksana teknis adalah mahasiswa NTB yang menempuh studi di UI, tidak berarti tautan emosional menjadi landasan dasar pembentukan institusi. Profesionalisme justru haruslah menjadi poin utama. N.P. Lovrich<sup>35</sup> dengan tegas, bahwa dewasa ini, profesionalisasi merupakan suatu nilai yang sangat didambakan oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pelayanan publik. Dalam meningkatkan kinerja organisasi publik diperlukan suatu strategi profesional yang didasarkan atas kemampuan melakukan tugas (pekerjaan) dan kesediaan melakukan penyesuaian tingkah laku.

Oleh karenanya, format kelembagaannya harus profesional, independen namun berbasis, dengan network nasional maupun internasional. Berafiliasi intim dengan pihak kampus dan berwibawa di mata kepala daerah. Bahwa yang menjadi dalang adalah mahasiswa NTB, tidak berarti cirinya seperti paguyuban. Logika profesional niscaya menjadi lebih utama dibanding pertautan emosional. Dengan demikian, kerja keseharian institusi ini adalah pengenalan sumber daya, penguatan jaringan, dan pemberdayaan riset.

Dengan independensinya, institusi tersebut mampu menjalankan perannya secara optimal, tanpa perlu takut adanya intervensi. Layaknya masyarakat kampus, kemerdekaan berwacana tentu sudah *given*. Sebab demikian, independen berbasis dapat dimaknai dengan adanya komunikasi intim antara mahasiswa, UI, dan pemerintah daerah. Perkawinan antara kata “independen” dan “berbasis” adalah manifestasi dua peran, bahwa institusi ini juga berlakon sebagai medium strategis penyusunan kebijakan pemerintahan. Dalam mendukung (khususnya) fungsi publikasi tersebut, harus ada kesepakatan legal, hitam di atas putih antara Pemerintah NTB dengan pihak UI. Hal ini penting (malah niscaya) sebagai legitimasi peran.

Sesuai dengan landasan filosofis yang diutarakan di atas, bahwa menjadi keniscayaan untuk membentuk suatu institusi progressif yang mampu melanjutkan kerja pemerintahan, sekaligus menjadi penggagas konsep. Suatu institusi yang tidak hanya bergerak dalam tataran ide, namun juga melakonkan kerja praktis-operasional. Oleh karenanya, NTB center diharapkan menjadi pusat kajian regional, yang berafiliasi intim dengan pihak kampus.

---

<sup>35</sup> N. P. Lovrich, *Managing Poor Peffarmers*, dalam *Handbook of Public Administration*, edited by J. L. Perry. (San Fransisco, CA: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1989).

Realitas nasional yang terpotret lewat perkembangan di ibukota menjadi bahan mentah gagasan, untuk kemudian dipraksiskan dengan agenda-agenda taktis.

Layaknya pusat studi, tentunya institusi ini lebih mengedepankan fungsi intelektual dan publikasi gagasan. Demikian berarti, apa yang menjadi program institusi akan sejalan dengan agenda pemerintah NTB (Provinsi dan Kab/ Kota). Namun tidak berarti NTB Center adalah lembaga dengan kajian pesanan. Apakah hasil kajiannya dapat diklaim sebagai dasar pembuatan kebijakan adalah sekunder. Sebab, NTB Center lebih banyak ingin memberikan sumbangan pemikiran yang dapat membantu akselerasi pembangunan NTB di segala bidang. Persis kiranya rumusan yang digunakan James McGann dalam menggambarkan kegiatan “think-tanks” serta tantangannya, yaitu memadukan mutu akademis (*academic*), pemberian nasehat (*advise*), dan advokasi (*advocacy*) secara tepat<sup>36</sup>.

## B. Mekanisme Organisasi

Dengan wujudnya sebagai suatu pusat kajian, institusi ini tentunya menjadi think-tank (tangki pemikir) dengan modifikasi tertentu. Dikatakan modifikasi, karena berafiliasi dengan institusi resmi, yakni Pemerintah NTB dan UI. Bahkan dibanding dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), NTB Center memiliki perbedaan bawaan. Bahwa CSIS ketika didirikan pada tanggal 1 September 1971 dirumuskan sebagai lembaga studi yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*)<sup>37</sup> semata, namun dengan afiliasi pada Pemerintah NTB dan UI sekaligus, dapat dibayangkan bahwa mobilitas kinerja dan program akan berjalan lancar. Pemerintah NTB sebagai supplier informasi, UI sebagai wahana publisitas, dan mahasiswa UI-NTB sebagai publikator konsep. Ini berarti ada kombinasi dari berbagai faktor, yakni faktor kedaerahan sebagai pemberi motivasi, kebesaran nama UI sebagai mitra strategis, dan tantangan pembangunan NTB yang masih sedemikian banyak.

Bahwa NTB Center memiliki logika dasar yang sedikit berbeda dengan think-tank pada umumnya berimplikasi logis pada fungsi yang akan dijalankan nantinya. NTB Center bukanlah sekadar lembaga riset, yang melakukan pengkajian akademik semata. Namun lebih dari itu, menjadi mitra kerja pemerintah NTB dalam mempublikasikan peluang dan keharusan berinvestasi di NTB. Berangkat dari fakta empirik yang terjadi di NTB, bahwa potensi sedemikian melimpah, namun belum tergarap dengan optimal, NTB Center diarahkan sebagai publikator strategis dalam mewujudkan motif tersebut.

Sebagai praksisme fungsi tersebut, NTB Center akan mengadakan riset mengenai apa yang merupakan masalah pokok dan penting yang dihadapi NTB. Dengan kualitas mahasiswa UI, dan didukung referensi yang lengkap di UI dan Jakarta pada umumnya, riset yang berorientasi kebijakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu, pakar yang tersebar di seantero ibukota dapat diberdayakan sebagai narasumber strategis dalam mengkaji wacana terkait. Diharapkan, hasil kajian NTB Center adalah solusi bagi permasalahan NTB.

Oleh karena demikian, segenap tim NTB Center harus tetap di *upgrade*, baik dalam intuisi intelektual, maupun kepekaan emosional. Bahwa membangun NTB bukan sekadar tanggung

---

<sup>36</sup> Lihat James McGann, *The Global Go To Think Tanks*, (Philadelphia: FPRI, 2008).

<sup>37</sup> Hadi Soesastro, *CSIS sebagai Lembaga Studi, CSIS 20 tahun*, (Jakarta: CSIS, 1991).

jawab keilmiahan semata, namun tugas sejarah yang harus bersama di emban oleh masyarakat NTB, termasuk perantau di UI. Spirit primordial ini akan menjadi penyalu semangat dan militansi bergerak, sehingga kajian dapat dilakukan berkala, dengan limitasi waktu tertentu.

Dalam konteks mempublikasikan potensi dan peluang investasi di NTB, pemberdayaan mahasiswa NTB menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam artian, semua mahasiswa NTB di UI terlibat dalam kegiatan termaksud, baik yang masih baru kuliah maupun yang telah senior dan mapan secara akademik. Kekeluargaan seperti ini adalah bentuk daripada primordialisme positif, tanpa menegasi aspek profesionalitas. Dengan menjunjung tinggi narasi akan NTB yang lebih baik, kualitas kegiatan tetap menjadi prioritas utama.

### C. Program Strategis

Di negara-negara miskin maupun industri maju, pengembangan lembaga kebijakan publik adalah proses yang bersifat bertahap, dan perbaikan-perbaikan dapat berbalik arah dengan cepat jika momentum tidak terjaga. Nasihat yang lebih baik mengenai opsi kebijakan dan strategi implementasi diperlukan oleh pemerintah di seluruh dunia<sup>38</sup>. Dengan kenyataan bahwa kebijakan publik yang dikonstruksi pemerintah selalu terlambat dengan perkembangan zaman, perlu adanya keterlibatan pihak luar dalam membantu kelancaran dan keberhasilan program pemerintah tersebut. Dan kampus adalah “artes liberal”, benteng pengetahuan yang menjadi pusat perkembangan wacana. Apalagi UI adalah universitas terbaik di Indonesia, dengan jaringan yang begitu luas, kemitraan strategis menjadi niscaya untuk dilakukan.

Oleh karenanya, NTB Center sebagai institusi perlu mendeskripsikan secara jelas dan terang mengenai apa yang menjadi program dan agenda kerja. Selain sebagai konsep sistematis, juga diharapkan menjadi proto-type bagi generasi kemudian, bahwa pembangunan NTB membutuhkan keterlibatan semua pihak.

#### 1. Riset Kebijakan

Sebagai suatu pusat studi, NTB Center diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengkaji persoalan-persoalan yang sejalan dengan agenda besar pembangunan NTB. Bahwa kajian yang dilakukan harus terarah, terbatas pada bidang-bidang strategis tertentu, dan senafas dengan narasi kemajuan daerah. Klasifikasi kajian ini penting agar apa yang dikaji dapat dipraksiskan menjadi agenda konkret yang berperan dalam menyokong akselerasi pembangunan NTB. Riset kebijakan adalah aktivitas rutin institusi, yang kemudian diejawantahkan ke dalam dokumentasi kerja. Dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam kerja di tataran teknis.

Riset kebijakan disini dapat dimaknai dalam dua pengertian, yakni analisis dan rekomendasi kebijakan. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan

---

<sup>38</sup> George M. Guess, dalam Pengantar Edisi Kedua buku *Managing Think Tanks*, (Jakarta; Pattiro, 2008), hal. ix.

menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik<sup>39</sup>. Oleh karenanya, riset kebijakan dalam pengertian analisis kebijakan berarti aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan<sup>40</sup>. Analisis ini dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan itu<sup>41</sup>.

Kebijakan yang dianalisis oleh NTB Center akan dijadikan sebagai bahan mentah bagi rekomendasi seperti apa yang akan disampaikan terkait masalah yang bersangkutan. Bahwa rekomendasi tersebut tidaklah bersifat prediktif yang hanya menghasilkan pernyataan formal tentang masa depan kebijakan, tidak memberikan alasan-alasan eksplisit mengapa kita harus lebih menghargai suatu keadaan masa mendatang daripada keadaan yang lain<sup>42</sup>. Namun sebaliknya menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya<sup>43</sup>. Artinya, rekomendasi kebijakan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan-kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi, atau aktivitas politik<sup>44</sup>.

## 2. Seminar dan Publikasi Kajian

Suatu kajian tentunya tidak boleh berhenti di belakang meja. Niscaya dia harus disampaikan kepada publik. Hasil kajian tentang NTB, baik menyangkut potensi alam, aspek administratif, maupun sekian tantangannya perlu disampaikan kepada publik, sehingga terjadi transfer pengetahuan. Hal ini penting karena publik ibukota sendiri masih begitu asing dengan NTB. Dalam konteks tersebut, yang menjadi peserta diskusi adalah masyarakat akademik.

Universitas Indonesia adalah institusi akademik yang terbuka dengan kegiatan transfer gagasan. Sejauh pengalaman tim NTB Center sendiri, pihak kampus bahkan mendukung setiap kegiatan yang berperan dalam penyebaran wacana intelektual. Dalam konteks bagaimana menyampaikan informasi seputar NTB ke publik, dukungan internal kampus tentunya tidak perlu dipertanyakan. Apalagi NTB Center sendiri adalah lembaga yang secara formil-institusional disokong oleh UI.

Dalam seminar dan publikasi kajian ini, masyarakat akademik, baik dari kalangan UI sendiri, maupun dari pihak luar dapat bersama bertukar pikir, guna pencarian solusi efektif atas permasalahan kedaerahan. Sasarannya, terbentuk opini bersama, bahwa NTB menyimpan sekian keunikan yang dapat diteliti lebih lanjut. Karena kegiatan ini

---

<sup>39</sup> Harold D. Laswell, *A Preview of Policy Sciences*, (New York; American Elsevier Publishing Co., 1971), hal. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal. 31.

<sup>42</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik [Public Policy Analysis: An Introduction Second edition]*, diterjemahkan Samodra Wibawa dkk, edisi kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 404.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 405.,

<sup>44</sup> Budi Winarno, *op.cit.*, hal. 31.

berorientasi akademik, diharapkan akan muncul calon-calon peneliti baru yang fokus mengangkat NTB sebagai tema utama penelitian lanjutan.

### 3. Business Meeting

Kebijakan pemerintahan, terutama dalam hal pengembangan ekonomi daerah harus melibatkan sekian aktor, termasuk pengusaha dan organisasi yang menaunginya. Business meeting dapat diartikan dalam wujud dialog strategis antara pemerintah NTB dengan organisasi kepengusahaan dan yang berkaitan dengan industri. Dalam hal ini terutama dengan kadin dan apindo, dan asosiasi buruh perlu adanya kesinambungan pemahaman. Selain bertujuan untuk persamaan pemikiran, juga dijadikan sebagai medium penyampai informasi, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Bagi dunia usaha, ini penting sebagai referensi awal dalam berinvestasi di NTB.

Dalam business meeting, aktor-aktor terkait dalam bidang usaha dan investasi dipertemukan dalam satu ruangan, saling berbagi informasi, dan mengkonstruksi dialog bisnis strategis. Pemerintah NTB menjadi penyampai informasi kepada segenap stake holder dan pelaku usaha, baik mengenai aspek struktural-legal, maupun kultural kemasyarakatan. Potensi alam NTB yang dapat dijadikan objek investasi disampaikan dengan jelas dan terang. Selanjutnya stake holder dan pelaku usaha dapat menjadikan informasi tersebut sebagai acuan, bahkan satu-satunya acuan valid dalam melakukan usaha di NTB.

Pertemuan bisnis ini dilakukan rutin teragenda. Hambatan struktural-birokratik yang terkadang menjadi faktor penghambat usaha akan dikomunikasikan di forum, sehingga antara pemerintah dan pelaku usaha terjadi kesesuaian pemahaman dan paradigma dalam melakukan kerjasama lanjutan. Hal ini menjadi penting, karena selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global, masalah terbesar investasi adalah juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang masih terjadi, dari proses perizinan investasi sampai dengan pelaksanaan realisasi investasi. Dan hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru termasuk persebaran investasi<sup>45</sup>. Padahal salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi<sup>46</sup>.

Business meeting juga diharapkan menjadi ajang evaluasi dan dialektik kebijakan di bidang usaha dan investasi. Artinya, apa yang kurang dalam kerjasama dapat dicarikan solusinya, sehingga berarah pada kebijakan yang pro-investasi, pro-pengembangan usaha, namun tetap mengedepankan kesejahteraan rakyat dan wibawa pemerintah. Dalam

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II memperkuat Sinergi antar bidang pembangunan, Bab III Ekonomi, diperbanyak oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2010*, hal. II. 3-4.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal II. 3-3.

business meeting juga akan diundang ahli dan pakar terkait sebagai pembicara dan pengupas kebijakan. Dengan format seperti ini, NTB dapat dikonstruksi menjadi daerah tujuan investasi yang sehat, primadonis, dan *win-win solution*. Pengusaha diuntungkan, pemerintah dan rakyat juga diuntungkan.

#### 4. NTB Expo

Dalam memperkenalkan potensi alam dan keunggulan NTB lainnya, perlu adanya suatu kegiatan khusus yang melakukan hal tersebut. Dalam pikiran tim NTB Center, kegiatan tersebut mewujudkan dalam *exhibition*, suatu pameran tentang NTB. Dengan sendirinya, segala apa yang merupakan potret NTB, baik potensi alam, maupun peluang menggarapnya dapat dipasarkan (marketing) secara tuntas. Sesuai definisinya, marketing adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran (exchange) antara dua pihak atau lebih. Dalam pertukaran terdapat proses hubungan (relation) yang memungkinkan interaksi, dimana dalam prosesnya masing-masing pihak ingin memaksimalkan dan menjamin bahwa kepentingannya sendiri akan terpenuhi<sup>47</sup>.

Kotler dan Levy (1969) berargumen bahwa penggunaan konsep marketing tidak hanya terbatas pada institusi bisnis saja<sup>48</sup>. Bahwa marketing juga dapat digunakan dalam medio transfer gagasan, wacana, termasuk informasi kebijakan tentang dunia usaha dan investasi. Bahkan diharapkan akan tercipta *branding* tentang NTB nantinya. Maksudnya bahwa dengan marketing tersebut, NTB dapat terorbit menjadi kawasan bisnis baru, menjadi primadona para investor. Meminjam bahasa ekonomi, brand yang terbentuk merupakan manifestasi praktis atas simbolisasi dan imajinasi yang diciptakan dan ditanamkan di benak konsumen<sup>49</sup>, yang dalam konteks ini adalah investor. Sehubungan dengan justifikasi teoritis yang disampaikan, NTB Center diharapkan menjadi pemasar terdepan akan potensi NTB. Bahkan mampu menciptakan brand positif di kalangan dunia usaha, bahwa NTB adalah surga bisnis.

Sebagai wujud praktisnya, dalam acara tersebut akan dijelaskan secara mendalam mengenai NTB sebagai suatu wilayah, potensi alam, sumber daya yang dapat digarap, termasuk peluang investasinya. Dan yang menjadi target utama NTB Expo adalah para pengusaha, baik lokal maupun asing.

NTB Expo adalah agenda besar yang berdimensi publik. Tentunya program ini butuh persiapan yang matang dan ekstra. Dalam NTB Expo, semua pihak yang dirasa relevan dengan akselerasi pembangunan NTB akan diundang. NTB Expo adalah ajang pertukaran informasi berskala nasional, dan bahkan global. Apa-apa yang selama ini publik tidak ketahui tentang NTB, dapat dipamerkan disini. Baik informasi mengenai potensi alam, produk kerajinan lokal, sampai keunikan budaya akan disajikan dalam pameran ini.

---

<sup>47</sup> R.P. Bagozzi, *Marketing as an Organized Behavioral System Exchange*, *Journal of Marketing* (38), 4, 1974, hal. 77-81.

<sup>48</sup> P. Kotler dan Levy S.J, *Broadening the Concept of Marketing*, *Journal of Marketing*, (33), 1, hal. 10-15.

<sup>49</sup> Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hal. 141.

## 5. Pemberdayaan SDM

Harus diakui, jumlah mahasiswa NTB di UI tidaklah banyak. Kecilnya kuantitas ini berpengaruh terhadap narasi pembangunan yang menjadi imaji. Karena terhambat secara psikologis dan dukungan struktural, menjadikan mahasiswa NTB di UI berpaling dari pembangunan wacana NTB. Sehingga akhirnya, peran besar yang harusnya dapat dijalankan mahasiswa UI tidak pernah optimal, kalau tidak disebut tidak berperan. Sebab demikian, tim NTB Center mencoba membangun rasa peduli tersebut dengan menyarankan suatu program yang harus dilakoni bersama oleh UI dan pemerintah NTB.

Sebagai universitas berparadigma global, tes masuk UI amat sulit. Para calon mahasiswa diharuskan belajar dengan rajin, fokus pada studinya. Namun sering terjadi, kualitas lulusan sekolah menengah NTB kalah saing dibanding daerah-daerah lain. Suatu kewajaran yang memang berangkat dari raelitas struktural, maupun kultural. Bahwa persiapan masuk kuliah siswa menengah di daerah lain (terutama Jabodetabek) dibanding NTB jauh terpaut, selain perbedaan fasilitas pembelajaran yang turut menjadi faktor penghambat, adalah secuil potret betapa SDM tertinggal sejak dari masa mudanya.

NTB Center diharapkan mampu menjadi advokator elit strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah NTB dan UI. Harapannya, terdapat prioritas bagi para calon mahasiswa asal NTB, sehingga dengan mudah dapat menempuh studi di universitas terbaik negeri ini. Pemberdayaan SDM ini adalah sebetulnya investasi untuk menyokong pembangunan masa depan, bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat kembali mengabdikan untuk daerah, membangun NTB dengan basis pengetahuannya selama menempuh studi di UI.

## IV. Rekomendasi

Untuk menindaklanjuti wacana pembentukan NTB Center, terdapat alur taktis yang perlu ditempuh. Antara Pemerintah NTB dengan UI harus terjalin kesepahaman emosional dan legal. Kesepahaman emosional dapat diartikan adanya kesatuan komitmen mengenai apa dan bagaimana peran NTB Center ke depan, serta munculnya kesadaran bersama bahwa NTB Center adalah salah satu solusi brilian dalam advokasi kebijakan pemerintahan, yang terintegrasi dengan ranah akademik. Selanjutnya kesepahaman legal dimaknai dengan adanya konstruksi dokumenter hitam-putih, bahwa NTB Center merupakan institusi resmi yang lahir dari kesepakatan legal antara Pemerintah NTB dengan UI.

Dengan logika berpikir seperti demikian, tim pembentuk NTB Center merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dilakoni, yakni pertemuan Pemerintah NTB-UI, nota kesepahaman (MoU), Formalisasi/ peresmian institut, dan terakhir wujud resmi institut lewat sekretariat NTB Center.

### A. Pertemuan NTB-UI

Sebagai langkah awal dalam menjalin kemitraan strategis tersebut, antara Pemerintah NTB dan UI harus melakukan pertemuan, informal maupun formal. Informal adalah pertemuan

awalan antara utusan/ perwakilan Pemerintah NTB dengan pihak UI untuk mengkonstruksi kesepahaman mengenai wacana ini. Lewat pertemuan ini, akan terbentuk kesadaran bersama, bahwa pembentukan NTB Center adalah keharusan yang tak mungkin ditolak. Selain itu, pertemuan informal ini akan menegaskan agenda selanjutnya, sebagai wujud praksisme wacana pembentukan NTB Center. Dan dari komunikasi awalan inilah, kesepakatan mengenai waktu, tempat, dan aspek teknis pertemuan selanjutnya disepakati.

Setelah terjadi pertemuan informal, maka langkah lanjutan adalah pertemuan formal antara Pemerintah NTB dengan UI. Pemerintah NTB mengirimkan delegasi resminya, UI pun demikian. Dalam pertemuan ini, akan dibahas berbagai isu dan wacana strategis mengenai NTB. Tim NTB Center merekomendasikan agar pertemuan ini diawali dengan *talkshow* dan dialog strategis antar *stake holder*. Dan dalam pertemuan inilah, institusionalisasi NTB Center dilakukan.

## B. Nota Kesepahaman (MoU)

Sebagai pusat studi regional yang berafiliasi dengan kampus, NTB Center tentunya harus memiliki legalitas. Artinya, NTB Center adalah lembaga yang secara hukum sah diakui, baik oleh Pemerintah NTB maupun UI. Demikian berarti, narasi pembentukan NTB Center harus diawali oleh perjanjian antara kedua belah pihak.

Perjanjian menjadi penting, karena pada waktu itulah komitmen diformalisasi, institusionalisasi kesepahaman terbentuk. Subekti (2002) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis<sup>50</sup>. Menilik definisi tersebut, perjanjian telah terjadi (minimal) apabila lisan diucapkan. Namun demikian, karena menyangkut nama baik, tugas intelektual, dan kredibilitas pemerintah, perjanjian tersebut harus menemukan bentuknya yang tertulis. Tim pembentuk NTB Center memaknainya dalam wujud nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah NTB dan UI.

Dalam MoU tersebut, akan disepakati banyak hal, mulai dari proses integrasi kelembagaan dengan kampus, komitmen Pemerintah NTB dan UI, maupun berbagai aspek teknis lainnya. Kesepakatan ini akan menjadi landasan bagi NTB Center ke depan untuk menjalankan programnya.

## C. Formalisasi Institut

Bahwa MoU antara Pemerintah NTB dan UI adalah legitimasi hukum pembentukan NTB Center, tidak berarti praksisme wujud berhenti disitu. Karena MoU adalah kesepakatan di atas kertas yang sifatnya teoritis belaka, perlu ada langkah lanjutan untuk mewujudkan institut. Oleh karenanya, UI perlu melegalisasi NTB Center sebagai suatu institusi resmi yang

---

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 1

berada di bawah yurisdiksinya. Surat penetapan harus diterbitkan untuk menegaskan legalitas lembaga NTB Center.

#### D. Wujud Afiliasi Kampus

Setiap organisasi tentu membutuhkan dukungan teknis, baik berupa ruangan maupun perangkat di dalamnya. Dalam hal ini NTB Center, memerlukan ruangan khusus sebagai wadah berkumpul dan medium diskursus. Sebab demikian, sekretariat NTB Center adalah niscaya adanya. Selain menunjukkan wujud afiliasi kampus, juga menjadi legitimasi formil, bahwa NTB Center memang ada di UI. Sehingga ketika Pemerintah NTB dan UI melakukan evaluasi atas agenda dan kinerja NTB Center, prosesnya akan berjalan dengan mudah.

Dalam hal ini, Pemerintah NTB dan UI harus mengkonstruksi langkah terakhir pembentukan NTB Center, yakni sebuah ruangan khusus sebagai sekretariat institut.

## Daftar Bacaan

### Buku

- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik [Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition]*, diterjemahkan Samodra Wibawa dkk, edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Friedman, Thomas L. *The World is Flat: A Brief History of The Twenty-First Century*. New York: Picador/ Farrar, Strauss and Girroux, 2007.
- H, Muenkner. *Basic Cooperative Values to Fill a Conceptual Vacuum with Special Reference to Africa*, Marburg, 1995.
- Horst, Siebert. (Ed.) *The Ethical Foundations of the Market Economy*, Tuebingen, 1994.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Lane, Jan-Erik dan Svante Ersson. *Ekonomi Politik Komparatif [Comparative Political Economy]*. Diterjemahkan dari buku aslinya oleh Haris Munandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Laswell, Harold D. *A Preview of Policy Sciences*. New York: American Elsevier Publishing Co., 1971).
- McGann, James. *The Global Go To Think Tanks*. Philadelphia: FPRI, 2008.
- Norberg, Johan. *Membela Kapitalisme Global [In Defense of Global Capitalism]*. Diterjemahkan oleh Arpani dan Sukasah Syahdan. Jakarta: Freedom Institute dan FNS, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1982.
- Soesastro, Hadi. *CSIS sebagai Lembaga Studi: CSIS 20 tahun*. Jakarta: CSIS, 1991.
- Struyk, Raymond J. *Managing Think Tanks: Petunjuk Praktis untuk Pendewasaan Organisasi*, revisi edisi kedua. Jakarta: Pattiro, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2007.

### Sumber lainnya

- Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Agustus 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen kehutanan. *Potensi Sumber Daya Hutan Produksi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen kehutanan, 2009.
- Economic Review Journal*, No. 199, Maret 2005.
- Handbook of Public Administration*, edited by J. L. Perry. San Fransisco, CA: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1989.
- Indonesia, *Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014*, Buku II memperkuat sinergi antar bidang pembangunan, Bab III ekonomi, diperbanyak oleh

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) 2010.

*Journal of Marketing* (38), 4, 1974.

Tim Penyusunan Laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Indonesia Tahun 2007. *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007.

UI Untuk Bangsa. *Rumusan Pemikiran untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Adil*. BEM UI 2009 dan ILUNI UI, 2009.

<http://www.detiknews.com/read/2011/01/15/135923/1547123/10/jadi-tuan-rumah-amm-retreat-gubernur-curhat-kemajuan-lombok?n991103605>, "Jadi Tuan Rumah AMM Retreat, Gubernur Curhat Kemajuan Lombok", diunduh 15 Januari 2011.

[http://www.research.ui.ac.id/v1/index.php?option=com\\_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=116](http://www.research.ui.ac.id/v1/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=116), "Kegiatan Pengabdian Masyarakat DRPM UI", diunduh 10 Januari 2011.

[http://Www.Ntbprov.Go.Id/Tentang\\_Sejarah.Php](http://Www.Ntbprov.Go.Id/Tentang_Sejarah.Php), "Sejarah Singkat Provinsi Nusa Tenggara Barat", diunduh tanggal 6 Januari 2011.

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=26&notab=2](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=26&notab=2), "Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 1996 – 2009", diunduh 11 Januari 2011.

<http://www.ui.ac.id/id/profile/page/pengantar>, "Tentang UI: Pengantar", diunduh 10 Januari 2011.